

PEMETAAN ISU DAN PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Rukuh Setiadi dan Samsul Ma'arif^{*)}

Abstrak

Perencanaan pembangunan suatu daerah akan efektif bila berangkat dari tujuan untuk menyelesaikan masalah utama atau isu daerah, oleh karena itu penting untuk lebih dahulu mengenali dan merumuskan isu dan permasalahan utama sebelum menyusun dokumen perencanaan. Bila dikaitkan dengan PP Nomor 38 tahun 2007 maka isu dan masalah utama perlu diidentifikasi di setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu dengan melakukan eksplorasi pada fenomena-fenomena pembangunan yang berlangsung di Kota Semarang. Pengumpulan data dengan studi literatur dan FGD kemudian hasilnya dianalisis dengan content analysis, FGD, pembobotan sederhana dan sintesis. Isu dan permasalahan Kota Semarang yang dikelompokkan berdasarkan 23 urusan penyelenggaraan dapat diidentifikasi sebanyak 93 isu dan permasalahan. Sebanyak 40 permasalahan dikategorikan sebagai isu utama yang perlu menjadi prioritas dalam penanganan.

Kata kunci : isu, permasalahan utama, urusan

Apa dan Mengapa Isu dan Permasalahan Utama?

Pembangunan kota sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah-masalah yang melekat dan terus berkembang di dalamnya. Serangkaian tindakan yang diatur dalam rangka penyelesaian masalah tersebut akan berhasil dengan baik jika ditunjang oleh suatu proses perencanaan pembangunan yang matang. Salah satu prasyarat bahwa proses pembangunan akan mencapai sasarannya ialah dengan mengetahui apakah isu-isu dan permasalahan utama di suatu kota dapat dikenali dan dirumuskan dengan baik.

Secara konseptual, proses pembangunan memiliki titik awal dan titik akhir. Proses tersebut memiliki serangkaian kegiatan yang dimulai dari awal dan diakhiri pada suatu tujuan tertentu. Serangkaian kegiatan tersebut tertata dalam urutan-urutan tertentu, yang menuju pada pencapaian akhir (tujuan). Dalam kerangka ini, pemetaan isu dan permasalahan utama pembangunan kota merupakan langkah awal yang perlu untuk dilakukan.

Pandangan-pandangan yang mengungkapkan bahwa perencanaan sebagai suatu panduan bagi aksi-aksi di masa yang akan datang dapat terwujud bila ada pemahaman atas isu dan permasalahan. Pemahaman atas isu dan permasalahan suatu kota merupakan suatu modal utama yang sangat dibutuhkan dalam upaya menyusun suatu arahan perencanaan dalam masa-masa yang akan datang. Isu dan permasalahan utama dalam konteks ini adalah

sebagai suatu 'knowledge' yang perlu dijumpai oleh kegiatan perencanaan, sehingga diperoleh suatu aksi di masa yang akan datang.

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (*gap*) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan.

Isu atau permasalahan utama dalam pembangunan pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka waktunya. Berdasarkan kerangka waktunya, biasanya dikenal dua jenis isu, yaitu isu umum dan isu spesifik. Isu umum adalah isu yang menyangkut masyarakat, kota, atau sistem ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun isu spesifik adalah isu-isu yang sama, hanya cakupannya terkait pada sebagian lokasi dan kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan kerangka waktunya, isu dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu: isu saat ini dan isu yang akan datang. Isu saat ini adalah isu yang telah dan sedang eksis, sedangkan isu yang akan datang adalah isu yang perlu untuk diantisipasi karena dikhawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang atau dalam waktu dekat.

Jika penanganan dalam pembangunan perkotaan sebagai basisnya adalah masalah maka ada kecenderungan akan terjadi pembangunan yang cenderung sektoral dan ketinggalan momentum.

^{*)} Staf Pengajar Jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah Universitas Diponegoro Semarang

Pemahaman atas isu utama pembangunan perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan kota dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Dalam rangka menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan dan untuk mengklarifikasikan arah dan tujuan organisasi, Pemerintah Kota Semarang telah merumuskan visi dan misi Kota Semarang 2005-2010: "*Semarang Kota Metropolitan yang Religius Berbasis Perdagangan dan Jasa*" yang selanjutnya dijabarkan dalam enam misi pedoman pembangunan untuk memberikan inspirasi dan tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Pada sisi lain, dengan diterbitkannya PP. 38/ 2007 menuntut adanya kejelasan batas-batas kewenangan dari berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian, diperlukan adanya sinkronisasi atau harmonisasi antara visi misi Kota Semarang dengan pengaturan berbagai urusan pemerintahan yang harus dilakukan di tingkat daerah. Dari upaya ini diharapkan dapat diidentifikasi isu dan permasalahan utama di setiap urusan pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk menindaklanjuti upaya dalam rangka memperjelas seperti apa isu atau permasalahan utama di Kota Semarang saat ini dan pada masa yang akan datang yang dirinci perurusan kewenangan di tingkat daerah. Atas dasar inilah studi **Pemetaan Isu dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Semarang dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan** dilakukan.

Mengapa Perlu Perumusan Isu dan Permasalahan Utama?

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran menyeluruh tentang isu dan permasalahan utama di Kota Semarang guna me-review atau mengkaji kembali dokumen-dokumen perencanaan lebih lanjut, baik dalam skala pemerintah kota maupun SKPD. Diharapkan studi ini juga semakin memperjelas operasionalisasi visi-misi pembangunan Kota Semarang dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pada saat ini dipecah-pecah ke dalam 33 urusan wajib dan pilihan.

Disamping itu, hasil kajian ini diharapkan dapat juga digunakan lebih lanjut untuk me-review indikator-indikator pembangunan kota pada saat

ini dan berbagai kebutuhan variabel data pembangunan kota.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari studi ini adalah untuk menghasilkan pemetaan (positioning) atas isu dan permasalahan utama pembangunan dan dirinci dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Semarang.

Adapun sasaran kegiatan terdiri atas:

- (1) Melakukan kajian atas data-data sekunder yang tersedia untuk memahami kondisi eksisting wilayah Kota Semarang dan kecenderungannya pada waktu yang akan datang.
- (2) Melakukan kajian atas data-data sekunder (media massa dan instansional) dan data primer melalui pelaksanaan FGD.
- (3) Melakukan verifikasi, mendefinisikan, dan memperjelas permasalahan yang dihasilkan.
- (4) Merumuskan isu dan permasalahan utama pembangunan Kota Semarang.
- (5) Melakukan pemetaan isu dan permasalahan utama pembangunan Kota Semarang berdasarkan derajat *magnitude* permasalahan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran menyeluruh tentang isu dan permasalahan utama di Kota Semarang guna me-review atau

Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi ini akan dibagi ke dalam lingkup wilayah dan substansi. Wilayah penelitian ini mencakup wilayah teritorial administratif Kota Semarang, yang di dalamnya terdapat enam belas kecamatan. Namun demikian, unit analisis yang terkait secara spasial (keruangan) dalam studi ini tidak dilakukan hingga kedalaman kecamatan.

Secara substansial, dalam menetapkan isu dan permasalahan utama di Kota Semarang lingkup penelitian ini dibatasi dengan:

- Informasi-informasi general dan atau spesifik yang disesuaikan dengan ketersediaan data-data serial. Oleh karena itu, kerangka waktu yang digunakan dalam menganalisis kecenderungan isu yang berkembang di setiap urusan pemerintahan tidak akan selalu sama.
- Operasionalisasi kriteria-kriteria penetapan isu akan dinilai secara kualitatif didasarkan atas pemahaman peneliti.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Teori-teori yang dikaji pada penelitian ini tidak

ditujukan untuk menghasilkan suatu jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan dicari (isu utama pembangunan di Kota Semarang). Teori-teori tersebut dalam penelitian ini hanya digunakan untuk mengkaji makna isu utama pembangunan guna mengenali wujud-wujud isu pembangunan yang mungkin berlaku di Kota Semarang. Penggalan isu utama dalam studi ini dilakukan dengan mengeksplorasi fenomena-fenomena pembangunan yang terjadi dan berlangsung di Kota Semarang.

Tahapan Penelitian

Dalam operasionalisasinya, penelitian ini akan melalui beberapa tahapan yang secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Tahap Persiapan.** Pada tahap ini tim peneliti melakukan penyamaan persepsi dengan koordinator tim teknis dan melakukan konsolidasi internal tim penelitian.
- **Tahap Studi literatur.** Studi literatur dalam penelitian ini akan mencakup tentang (1) makna isu dan permasalahan utama secara mendalam dan bagaimana suatu permasalahan dapat dikatakan strategis, (2) kajian akademis yang akan menyoroti (*best practices*) beberapa penetapan isu utama pembangunan kota, baik yang tersedia di dalam dan luar negeri, (3) kajian peraturan yang berkaitan dengan PP. 38 Tahun 2007 tentang batas kewenangan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- **Tahap Penyiapan Instrumen Penelitian.** Kajian-kajian di atas perlu dijadikan sebagai suatu landasan dalam pengembangan instrumen penelitian. Instrumen tersebut berupa:
 - Protokol FGD dalam rangka pengumpulan data primer di dua kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan perbukitan Kota Semarang.
 - Matriks penggalan isu-isu pembangunan yang berkembang di Kota Semarang.
 - Matriks kebutuhan data sekunder/instansional untuk memberikan justifikasi yang akurat atas isu-isu yang diangkat.
- **Pengumpulan Data/Survei.** Pengumpulan data yang berupa diskusi kelompok terfokus guna mengeksplorasi isu utama telah dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti yang melibatkan *stakeholders* (masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparatur kelurahan yang mewakili daerah pesisir pantai) di Kelurahan Tanjung Mas pada 5 September 2007. Adapun FGD yang mewakili masyarakat di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran Kota Semarang

dilaksanakan di YP4K pada tanggal 27 September 2007. Disamping itu, eksplorasi isu utama juga dilakukan dengan mencari pemberitaan media massa (khususnya melalui Suara Merdeka dan Kompas) tentang masalah-masalah yang berkembang terkait dengan pelaksanaan dan rencana pembangunan Kota Semarang. Adapun data-data sekunder/ instansional merupakan data juga akan digunakan guna melakukan justifikasi atas isu-isu yang berhasil diperoleh. Data-data sekunder yang dipergunakan diantaranya adalah:

- Semarang dalam Angka Tahun 2002-2007 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik Kota Semarang.
- Laporan pertanggungjawaban Walikota Semarang.
- Laporan-laporan sektoral yang diterbitkan oleh SKPD di Kota Semarang
- **Tahap Analisis.** Sampai dengan tahap ini data-data sekunder dan primer yang telah berhasil dikumpulkan masih berupa hasil penggalan isu-isu pembangunan kota. Kegiatan analisis dilakukan untuk merumuskan isu-isu yang beragam tersebut menjadi isu utama, dengan teknik analisis yang telah disebutkan di atas, yaitu: (1) *Content Analysis*, (2) FGD, (3) Pembobotan Sederhana, dan (4) *Sintesis*.
- **Pelaporan dan Diseminasi Hasil Penelitian.** Hasil penelitian perlu untuk dilaporkan ke dalam beberapa tahap sesuai dengan tahapan pelaksanaan penelitian dalam suatu seminar. Setidaknya akan diadakan tiga kali seminar. Tahapan seminar tersebut secara berurutan adalah sebagai suatu forum untuk: (1) membahas rencana kerja dan agenda penelitian, (2) mengetahui kemajuan kegiatan dan verifikasi hasil penelitian, dan (3) sosialisasi dan penyempurnaan hasil penelitian.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan untuk menggali isu dalam studi ini meliputi:

- (1) Teknik pengkajian isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan makna-makna yang tersurat maupun yang tersirat melalui media massa lokal dan nasional sebagai wujud perhatian publik. Dengan semakin tingginya intensitas pemberitaan isu yang bersangkutan muncul di media massa, semakin menunjukkan keutamaan isu tersebut untuk ditindaklanjuti dengan lebih jauh. Disamping itu, data-data sekunder/instansional akan digunakan untuk memperkuat dan memberikan justifikasi terhadap upaya

pengungkapan makna tersirat dan tersurat yang ada.

- (2) Teknik diskusi kelompok terfokus (*Focussed Group Discussion/ FGD*). Teknik ini dilakukan pada beberapa kelompok masyarakat yang dibagi berdasarkan karakteristik geografis, dimana mereka hidup dan melangsungkan kehidupannya di Kota Semarang. Secara geografis Kota Semarang terbagi dalam dua tipologi kawasan, yaitu kawasan 'Semarang-bawah' yang berupa daerah pesisir pantai dan kawasan 'Semarang-atas' yang merupakan daerah perbukitan. FGD akan dilakukan pada kelompok *stakeholders* di dua kawasan terpilih, yang masing-masing mewakili masyarakat di setiap karakteristik geografis Kota Semarang.

Adapun dalam menetapkan atau memformulasikan isu utama, satu dari beberapa alternatif berikut adalah teknik yang akan digunakan:

- (1) Teknik pembobotan sederhana (*scoring*). Teknik ini digunakan untuk membuat peringkat pada beberapa masalah utama di setiap urusan pemerintahan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Sintesis (*synthesis*). Teknik ini akan diawali dengan melakukan pengelompokan atas masalah-masalah yang memiliki kesamaan dan memahami hubungan yang terjadi antara kelompok masalah satu dengan lainnya untuk disimpulkan kesamaan penyebabnya.

Kajian Isu dan Permasalahan Kota Semarang

Berdasarkan teknik analisis dan studi literatur yang telah dilakukan, diperoleh isu dan permasalahan Kota Semarang yang dikelompokkan berdasarkan 23 urusan. Dalam pembahasannya, isu dan permasalahan tersebut secara ringkas dapat dilihat pada Tabel I berikut ini:

**Tabel I
Isu Dan Permasalahan Perurusan Kota Semarang**

| NO | URUSAN | ISU DAN PERMASALAHAN |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Pendidikan | Tingginya angka putus sekolah Naiknya angka buta huruf dewasa Keraguan terhadap akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana pendidikan Rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan Rendahnya mutu pendidikan di Kota Semarang |
| 2 | Kesehatan | Meningkatnya jumlah penderita gizi buruk Tingginya angka kematian ibu melahirkan Lambannya penurunan angka penderita TBC yang kecil Kurangya cakupan air bersih pada daerah rawan kekeringan Penurunan cakupan imunisasi BCG Ketergantungan bahan baku obat generik pada bahan baku impor Fluktuasi kegiatan posyandu purnama dan mandiri |
| 3 | PU: Bina Marga dan Pengairan | Kualitas sistem drainase yang tidak seimbang dengan perubahan tata guna lahan dan mengakibatkan peningkatan debit sungai Kerusakan jalan yang disebabkan oleh genangan rob dan banjir Pengambilan ABT yang tidak terkendali dan tingginya laju penurunan permukaan tanah Pencemaran sumber air bersih |
| 4 | Cipta Karya: Perumahan | Tingginya <i>backlog</i> perumahan Buruknya kualitas hidup dan lingkungan di permukiman kumuh Rendahnya manajemen pengelolaan rumah susun Ketersediaan fasilitas perumahan masih terbatas |
| 5 | Tata Ruang | Luasan ruang terbuka hijau belum mencapai target sesuai dengan RTR Kurangya sosialisasi RTR terutama di bantaran sungai dan kawasan rawan bencana Inkonsistensi RTR Belum ada penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang |
| 6 | Perencanaan Pembangunan | Inkonsistensi antara program SKPD terhadap RPJM dan RKPD Rendahnya dana untuk kegiatan penelitian |
| 7 | Perhubungan | Rendahnya manajemen transportasi kota Penurunan pengguna angkutan umum dan peningkatan jumlah kendaraan pribadi |

| NO | URUSAN | ISU DAN PERMASALAHAN |
|----|---|---|
| | | Meningkatnya angka kejadian kecelakaan lalu lintas |
| | | Tingginya kepadatan lalu lintas di jalan-jalan utama |
| | | Peran trotoar tidak maksimal |
| | | Kurangnya jumlah dan alokasi halte bus |
| | | Rendahnya kualitas pengelolaan parkir |
| | | Kondisi dan pengelolaan terminal yang tidak memadai |
| 8 | Lingkungan Hidup | Penurunan kualitas udara perkotaan dengan berkurangnya paru-paru kota |
| | | Peningkatan volume sampah kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan armada pengangkutan sampah |
| | | Belum optimalnya kegiatan daur ulang |
| | | Banyaknya penambangan galian C yang tidak berijin dan lemahnya penegakan hukum terhadap penambang galian C ilegal |
| | | Surat Izin Pengeboran ABT tidak berperan maksimal sebagai alat pengendali |
| | | Kurangnya proteksi dan regulasi Pemkot terhadap kawasan konservasi |
| | | Kurangnya koordinasi antarlembaga dalam mengendalikan dan melindungi kawasan konservasi |
| | | Kurang puasnya masyarakat terhadap kondisi taman |
| 9 | Pertanahan | Revitalisasi kawasan yang masih menjadi polemik |
| | | Konversi lahan pertanian dan hijau menjadi perumahan di Semarang Atas |
| | | Penanganan lahan kritis tidak maksimal |
| | | Konversi lahan subur dan produktif akibat pembangunan infrastruktur oleh karena kurangnya proteksi terhadap lahan subur dan produktif |
| 10 | Kependudukan dan Catatan Sipil | Meningkatnya angka kelahiran dan kematian |
| | | Kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di pusat kota |
| | | Pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran kota |
| | | Buruknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan |
| 11 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rendahnya partisipasi perempuan dalam ORMAS dan perekonomian |
| | | Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak |
| 12 | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Rendahnya kesejahteraan bagi para pensiunan |
| | | Rendahnya pendapatan rumah tangga per bulan |
| 13 | Sosial | Peningkatan angka kemiskinan |
| | | Tingginya angka pengangguran |
| | | Tingginya angka kriminalitas |
| | | Peningkatan jumlah gelandangan |
| 14 | Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Semakin sedikitnya jumlah penduduk yang bekerja |
| | | Tingginya angka beban ketergantungan |
| | | Pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh (jam kerja dan upah) |
| | | Belum ada jaminan keselamatan kerja bagi para buruh |
| | | Sebagian besar perusahaan padat karya bertahan dengan margin keuntungan terbatas |
| 15 | Koperasi dan UMKM | Kurangnya produktivitas SDM dalam UMKM |
| | | Minimnya modal dan anggaran untuk pemberdayaan UMKM |
| 16 | Penanaman Modal | Lamanya prosedur perijinan investasi |
| | | Kurangnya minat investasi, baik PMDN dan PMA |
| 17 | Kebudayaan dan Pariwisata | Tingkat hunian hotel yang stagnan |
| | | Banyaknya aset bangunan tua bersejarah yang tidak terawat |
| | | Hilangnya aset budaya |
| | | Kurangnya event-event kesenian dan budaya tradisional |
| 18 | Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat | Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada |
| | | Rendahnya partisipasi perempuan dalam Pilkada |
| | | Kasus pelanggaran HAM: Kasus lingkungan dan pelanggaran hak kaum miskin kota |
| | | Meningkatnya tindakan kriminal |
| 19 | Pengelolaan Keuangan, Aset, | Ketidakpuasan masyarakat terhadap Satpol PP |

| NO | URUSAN | ISU DAN PERMASALAHAN |
|----|---------------------------------------|--|
| | Pengawasan dan Kepegawaian | Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD Semarang Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Walikota Rendahnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan satu atap atau <i>one stop service</i> (OSS) |
| 20 | Komunikasi dan Informatika | Rendahnya akses masyarakat terhadap internet Letak tower di kawasan permukiman Masih terbatasnya dan mahalnya penggunaan jaringan seluler sebagai media informasi Rendahnya oplah media cetak |
| 21 | Pertanian dan Ketahanan Pangan | Penurunan produktivitas komoditas tanaman pangan, palawija dan peternakan Penurunan beberapa angka produksi tanaman buah lokal (mangga, duku/langsep, jambu air), sehingga tidak mencukupi permintaan konsumen Berkurangnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Tingginya laju konversi lahan pertanian Tingginya angka penggunaan pestisida untuk kegiatan pertanian |
| 22 | Kelautan dan Perikanan | Fluktuasi produksi perikanan darat Penurunan produksi ikan laut Konsumsi ikan yang masih rendah Rendahnya pemanfaatan dan kualitas TPI Pencemaran biota laut akibat limbah industri |
| 23 | Perkebunan dan Kehutanan | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat tanaman/pohon hasil peremajaan hutan Penebangan pohon yang tidak terkendali di Semarang Atas |

Penentuan Prioritas Isu dan Permasalahan Utama Kota Semarang

Proses penentuan prioritas isu dan permasalahan utama menggunakan metode pembobotan (*scoring* dan *rating*) sederhana. Penentuan prioritas isu dan permasalahan utama tersebut menggunakan tiga kriteria utama sebagai berikut:

- Besaran (Magnitude).** Kriteria ini untuk melihat pengaruh atau dampak dari setiap isu. Dalam kajian ini, pengaruh atau dampak dari suatu masalah dapat diketahui melalui: (a). Luasan/cakupan dampak suatu masalah dan (b). intensitas seringnya masalah tersebut muncul dari tahun ke tahun.
- Derajat urgensi (Degree of Urgency).** Kriteria ini untuk melihat seberapa

mendesaknya suatu masalah untuk segera ditangani. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan maka isu tersebut semakin strategis.

- Peluang dilakukan tindakan (Do-able).** Kriteria ini untuk melihat peluang dilakukannya tindakan untuk merespon isu strategis.

Ketiga kriteria di atas dianggap atau diasumsikan sama pentingnya antara satu dibandingkan dengan lainnya. Oleh karena itu, ketiga kriteria di atas akan diberi nilai skor atau bobot yang sama. Selanjutnya setiap kriteria akan diberikan rating dari satu hingga tiga, dengan parameter sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Pembobotan Dan Rating Kestrategisan Isu

| KRITERIA | RATING ISU | | |
|---------------------------|--|---|---|
| | 1 (KURANG STRATEGIS) | 2 (CUKUP STRATEGIS) | 3 (SANGAT STRATEGIS) |
| Besaran Dampak | <ul style="list-style-type: none"> Cakupan pengaruh lokal (satu kecamatan) Frekuensi kejadian hanya sesaat dan tidak menerus | <ul style="list-style-type: none"> Cakupan pengaruhnya lebih dari satu kecamatan Frekuensi kejadiannya sedang dan menerus | <ul style="list-style-type: none"> Cakupan pengaruhnya hampir atau keseluruhan kota Frekuensi kejadian sering dan menerus |
| Derajat Urgensi | <ul style="list-style-type: none"> Bisa ditunda, dan kerugian akibat permasalahan tergolong kecil Kedalaman pengaruh hanya pada satu sektor/urusan | <ul style="list-style-type: none"> Ciptakan resiko/ kerugian yang besar bila ditunda Kedalaman pengaruh terhadap beberapa sektor/urusan | <ul style="list-style-type: none"> Tidak bisa ditunda karena sudah sangat kritis/sering. Kedalaman pengaruh saling terkait pada semua sektor/urusan |
| Kemungkinan untuk Diatasi | <ul style="list-style-type: none"> Di luar kewenangan Pemerintah Kota Perlu <i>political will</i> yang kuat | <ul style="list-style-type: none"> Dalam kewenangan kota, tetapi penyelesaiannya membutuhkan biaya yang | <ul style="list-style-type: none"> Dalam kewenangan kota, penyelesaian membutuhkan biaya dan teknologi yang |

| KRITERIA | RATING ISU | | |
|----------|-------------------------|---|--|
| | 1 (KURANG STRATEGIS) | 2 (CUKUP STRATEGIS) | 3 (SANGAT STRATEGIS) |
| | | besar dan terkadang tinggi • Perlu sedikit <i>political will</i> | terjangkau • Tidak memerlukan <i>political will</i> |

Berdasarkan kriteria pembobotan dan dengan menerapkannya terhadap isu dan permasalahan

Kota Semarang, berikut ini disajikan pemberian *rating* atas isu yang bersangkutan.

Tabel 3
Matriks Penentuan Prioritas Permasalahan /Isu Utama Kota Semarang

| NO | PERMASALAHAN UTAMA/ISU | KRITERIA DAN RATING | | | TOTAL |
|----|---|---------------------|----|----|-------|
| | | M | DU | DA | |
| 1 | Urusan Pendidikan | | | | |
| | a. Tingginya angka putus sekolah | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | b. Naiknya angka buta huruf dewasa | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | c. Keraguan terhadap akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana pendidikan | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | d. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan | 2 | 3 | 3 | 8 |
| | e. Rendahnya mutu pendidikan di Kota Semarang | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | Urusan Kesehatan | | | | |
| | a. Meningkatnya jumlah penderita gizi buruk | 1 | 3 | 3 | 7 |
| | b. Tingginya angka kematian ibu melahirkan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| | c. Lambannya penurunan angka penderita TBC yang kecil | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | d. Kurangnya cakupan air bersih pada daerah rawan kekeringan | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | e. Penurunan cakupan imunisasi BCG | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | f. Ketergantungan bahan baku obat generik pada bahan baku impor | 3 | 2 | 1 | 6 |
| | g. Fluktuasi kegiatan posyandu purnama dan mandiri | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Urusan PU: Bina Marga dan Pengairan | | | | |
| | a. Kualitas sistem drainase yang tidak seimbang dengan perubahan tata guna lahan dan mengakibatkan peningkatan debit sungai | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | b. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh genangan rob dan banjir | 2 | 3 | 3 | 8 |
| | c. Pengambilan ABT yang tidak terkendali dan tingginya laju penurunan permukaan tanah | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | d. Pencemaran sumber air bersih | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Urusan Cipta Karya: Perumahan | | | | |
| | a. Tingginya <i>backlog</i> perumahan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| | b. Buruknya kualitas hidup dan lingkungan di permukiman kumuh | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | c. Rendahnya manajemen pengelolaan rumah susun | 2 | 2 | 1 | 5 |
| | d. Ketersediaan fasilitas perumahan masih terbatas | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Urusan Tata Ruang | | | | |
| | a. Luasan ruang terbuka hijau belum mencapai target sesuai dengan RTR | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | b. Kurangnya sosialisasi RTR terutama di bantaran sungai dan kawasan rawan bencana | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | c. Inkonsistensi RTR | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | d. Belum ada penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | Urusan Perencanaan Pembangunan | | | | |
| | a. Inkonsistensi antara program SKPD terhadap RPJM dan RKPDP | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | b. Rendahnya dana untuk kegiatan penelitian | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Urusan Perhubungan | | | | |
| | a. Rendahnya manajemen transportasi kota | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | b. Penurunan pengguna angkutan umum dan peningkatan jumlah kendaraan pribadi | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | c. Meningkatnya angka kejadian kecelakaan lalu lintas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | d. Tingginya kepadatan lalu lintas di jalan-jalan utama | 3 | 3 | 1 | 7 |
| | e. Peran trotoar tidak maksimal | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | f. Kurangnya jumlah dan alokasi halte bus | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | g. Rendahnya kualitas pengelolaan parkir | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | h. Kondisi dan pengelolaan terminal yang tidak memadai | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Urusan Lingkungan hidup | | | | |
| | a. Penurunan kualitas udara perkotaan dengan berkurangnya paru-paru kota | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | b. Peningkatan volume sampah kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan armada pengangkutan sampah | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | c. Belum optimalnya kegiatan daur ulang | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | d. Banyaknya penambangan galian C yang tidak berijin dan lemahnya penegakan hukum terhadap penambang galian C ilegal | 2 | 3 | 3 | 8 |

**Pemetaan Isu Dan Permasalahan Utama
Pembangunan Kota Semarang Dalam
Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan**

(Rukuh Setiadi dan Samsul Mu'arif)

| NO | PERMASALAHAN UTAMA/ISU | KRITERIA DAN RATING | | | TOTAL |
|----|--|---------------------|----|----|-------|
| | | M | DU | DA | |
| | e. Surat Izin Pengeboran ABT tidak berperan maksimal sebagai alat pengendali | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | f. Kurangnya proteksi dan regulasi Pemkot terhadap kawasan konservasi | 1 | 2 | 2 | 5 |
| | g. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam mengendalikan dan melindungi kawasan konservasi | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | o. Kurang puasny masyarakat terhadap kondisi taman | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Urusan Pertanian | | | | |
| | a. Revitalisasi kawasan yang masih menjadi polemik | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | b. Konversi lahan pertanian dan hijau menjadi perumahan di Semarang Atas | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | c. Penanganan lahan kritis tidak maksimal | 1 | 2 | 2 | 5 |
| | d. Konversi lahan subur dan produktif akibat pembangunan infrastruktur oleh karena kurangnya proteksi terhadap lahan subur dan produktif | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | |
| | a. Meningkatnya angka kelahiran dan kematian | 1 | 2 | 3 | 6 |
| | b. Kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di pusat kota | 1 | 2 | 2 | 5 |
| | c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran kota | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | d. Buruknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| | a. Rendahnya partisipasi perempuan dalam ORMAS dan perekonomian | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | b. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | |
| | a. Rendahnya kesejahteraan bagi para pensiunan | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | b. Rendahnya pendapatan rumah tangga per bulan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | Urusan Sosial | | | | |
| | a. Peningkatan angka kemiskinan | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | b. Tingginya angka pengangguran | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | c. Tingginya angka kriminalitas | 2 | 2 | 1 | 5 |
| | d. Peningkatan jumlah gelandangan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | |
| | a. Semakin sedikitnya jumlah penduduk yang bekerja | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | b. Tingginya angka beban ketergantungan | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | c. Pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh (jam kerja dan upah) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | d. Belum ada jaminan keselamatan kerja bagi para buruh | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | e. Sebagian besar perusahaan padat karya bertahan dengan margin keuntungan terbatas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Urusan Koperasi dan UMKM | | | | |
| | a. Kurangnya produktivitas SDM dalam UMKM | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | b. Minimnya modal dan anggaran untuk pemberdayaan UMKM | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | Urusan Penanaman Modal | | | | |
| | a. Lamanya prosedur perijinan investasi | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | b. Kurangnya minat investasi, baik PMDN dan PMA | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | Urusan Kebudayaan dan Pariwisata | | | | |
| | a. Tingkat hunian hotel yang stagnan | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | b. Banyaknya aset bangunan tua bersejarah yang tidak terawat | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | c. Hilangnya aset budaya | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | d. Kurangnya event-event kesenian dan budaya tradisional | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat | | | | |
| | a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | b. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pilkada | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | c. Kasus pelanggaran HAM: Kasus lingkungan dan pelanggaran hak kaum miskin kota | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | d. Meningkatnya tindakan kriminal | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 19 | Urusan Pengelolaan Keuangan, Aset, Pengawasan dan Kepegawaian | | | | |
| | a. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Satpol PP | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | b. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD Semarang | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | c. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Walikota | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | d. Rendahnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan satu atap atau one stop service (OSS) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | |
| | a. Rendahnya akses masyarakat terhadap internet | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | b. Letak tower di kawasan permukiman | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | c. Masih terbatasnya dan mahalnya penggunaan jaringan seluler | 3 | 3 | 1 | 7 |

| NO | PERMASALAHAN UTAMA/ISU | KRITERIA DAN RATING | | | TOTAL |
|----|---|---------------------|----|----|-------|
| | | M | DU | DA | |
| | sebagai media informasi | | | | |
| | d. Rendahnya oplah media cetak | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 21 | Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan | | | | |
| | a. Penurunan produktivitas komoditas tanaman pangan, palawija dan peternakan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | b. Penurunan beberapa angka produksi tanaman buah lokal (mangga,duku/langsep, jambu air) sehingga tidak mencukupi permintaan konsumen | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | c. Berkurangnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | d. Tingginya laju konversi lahan pertanian | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | e. Tingginya angka penggunaan pestisida untuk kegiatan pertanian | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Urusan Kelautan dan Perikanan | | | | |
| | a. Fluktuasi produksi perikanan darat | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | b. Penurunan produksi ikan laut | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | c. Konsumsi ikan yang masih rendah | 3 | 1 | 3 | 7 |
| | d. Rendahnya pemanfaatan dan kualitas TPI | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | e. Pencemaran biota laut akibat limbah industri | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | Urusan Perkebunan dan Kehutanan | | | | |
| | a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat tanaman/pohon hasil peremajaan hutan | 2 | | 2 | 6 |
| | b. Penebangan pohon yang tidak terkendali di Semarang Atas | 2 | 3 | 2 | 7 |

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa di setiap urusan pemerintahan daerah dapat diidentifikasi sejumlah isu penting dan diantara isu penting tersebut terdapat isu utama yang kedudukannya lebih signifikan untuk segera

diatasi. Tabel 4 berikut ini akan mengelaborasi lebih lanjut Tabel 2 di atas, sehingga dapat diketahui isu-isu utama di setiap urusan Pemerintah Kota Semarang

Tabel 4
Prioritas Isu Utama Di Setiap Urusan Pemerintahan Kota Semarang

| NO | PERMASALAHAN UTAMA/ISU | ISU UTAMA |
|----|---|---|
| 1 | Urusan Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan • Rendahnya mutu pendidikan di Kota Semarang |
| 2 | Urusan Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah penderita gizi buruk • Tingginya angka kematian ibu melahirkan • Kurangnya cakupan air bersih pada daerah rawan kekeringan • Penurunan cakupan imunisasi BCG |
| 3 | Bina Marga dan Pengairan | <ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan jalan yang disebabkan oleh genangan rob dan banjir |
| 4 | Urusan Cipta Karya/Perumahan | <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas perumahan masih terbatas |
| 5 | Urusan Tata Ruang | <ul style="list-style-type: none"> • Luasan ruang terbuka hijau belum mencapai target sesuai dengan Rencana Tata Ruang • Inkonsistensi Rencana Tata Ruang • Belum ada penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang |
| 6 | Urusan Perencanaan Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Inkonsistensi antara program SKPD terhadap RPJM dan RKPD |
| 7 | Urusan Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pengguna angkutan umum dan peningkatan jumlah kendaraan pribadi |
| 8 | Urusan Lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya penambangan galian C yang tidak berijin dan lemahnya penegakan hukum terhadap penambang galian C ilegal • Surat Izin Pengeboran ABT tidak berperan maksimal sebagai alat pengendali |
| 9 | Urusan Pertanahan | <ul style="list-style-type: none"> • Konversi lahan pertanian dan hijau menjadi perumahan di Semarang Atas |
| 10 | Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil | <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran kota • Buruknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan |
| 11 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak |
| 12 | Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pendapatan rumah tangga per bulan |
| 13 | Urusan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan angka kemiskinan • Tingginya angka pengangguran |
| 14 | Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Semakin sedikitnya jumlah penduduk yang bekerja • Tingginya angka beban ketergantungan |
| 15 | Urusan Koperasi dan UMKM | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya produktivitas SDM dalam UMKM |
| 16 | Urusan Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> • Lamanya prosedur perijinan investasi • Kurangnya minat investasi, baik PMDN dan PMA |
| 17 | Urusan Kebudayaan dan Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya aset bangunan tua bersejarah yang tidak terawat • Kurangnya event-event kesenian dan budaya tradisional |
| 18 | Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada • Rendahnya partisipasi perempuan dalam pilkada |

| NO | PERMASALAHAN UTAMA/ISU | ISU UTAMA |
|----|---|---|
| 19 | Urusan Pengelolaan Keuangan, Aset, Pengawasan dan Kepegawaian | <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD Semarang • Rendahnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan satu atap atau <i>one stop service</i> (OSS) |
| 20 | Urusan Komunikasi dan Informatika | <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya dan mahalnya penggunaan jaringan seluler sebagai media informasi • Rendahnya oplah media cetak |
| 21 | Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan | <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya laju konversi lahan pertanian |
| 22 | Urusan Kelautan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> • Fluktuasi produksi perikanan darat • Penurunan produksi ikan laut • Konsumsi ikan yang masih rendah |
| 23 | Urusan Perkebunan dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Penebangan pohon yang tidak terkendali di Semarang Atas |

Berdasarkan Tabel 3 dan 4 di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua puluh tiga urusan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Semarang, dapat diidentifikasi sembilan puluh tiga isu dan permasalahan dan diantaranya terdapat sejumlah empat puluh permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai isu utama yang perlu untuk diprioritaskan dalam tindak lanjutnya. Selanjutnya, isu dan permasalahan yang diprioritaskan tersebut dipetakan dalam Peta Kota Semarang. Dengan demikian, dapat diketahui secara pasti posisi isu strategis yang ada, sehingga dapat dengan mudah diinterpretasikan secara visual.

Daftar Pustaka

- Agiasto, LV. 2007. Fenomena Pengelolaan Prasarana di Kawasan Perbatasan, Studi Kasus: Pengelolaan Persampahan di Perumnas Pucang Gading di Perbatasan Kab. Demak dan Kota Semarang. (Tugas Akhir). Semarang. Jurusan PWK Fakultas Teknik UNDIP. hal 77.
- Allmendinger, Philip et al (ed.). 2000. *Introduction To Planning Practice*. England: John Wiley & Sons, Ltd.
- Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2006*.
- Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2006. *Indikator Pemberdayaan Gender Kota Semarang Tahun 2006*.
- Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2006. *Profil Rumah Tangga Miskin Kota Semarang Tahun 2006*.
- Bappenas. 2006. *Strategi dan Rencana Aksi Lokal Kota Semarang Untuk Peningkatan Kualitas Udara Perkotaan*. Jakarta.
- Bryson, J.M and Einsweiler, R.C. 1988. *Strategic Planning: Threats and opportunities for Planners*. Washington DC: Planners Press, APA.
- Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. USA: Prentice-Hall, Inc. pp 102.

Hogwood Brian, W. and Gunn, Lewis A. 1988. *Policy Analysis For The Real World*. New York: Oxford University Press.

Isnawati, Ike. 2006. Peran Developer Dalam Penyediaan Rumah Sederhana di Kota Semarang. (Tugas Akhir), Semarang. Jurusan PWK Fakultas Teknik UNDIP. hal 67.

Kathalina, Betty. 2002. Gambaran Karakteristik Penderita Tuberkulosis Paru Resisten dan Identifikasi Faktor Pengobatan Penyebab Terjadinya Resistensi di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Kota Semarang. (Skripsi). Semarang. Universitas Diponegoro.

Perumusan Isu Strategis. [Home Page of UNICEF Organization]. www.unicef.org/indonesia/id/06_Modul_5_Perumusan_Isu_Strategis.PDF. (8 April 2008).

Sulistyaningsih, Novi. 2007. Identifikasi Karakteristik Kawasan Tertinggal Kota Semarang. (Tugas Akhir). Semarang . Jurusan PWK Fakultas Teknik UNDIP. hal 65.

Tarigan, Robinson, Drs. M.R.P. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.